INSTRUMEN DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

Saiful Anwar
KJKS Azkiya Metro

Abstrac

Distribution in the Islamic concept does not only prioritize economic aspects where size is based on the amount of property owned, but also discusses how the use of human potential can be distributed, in the form of appreciation for the right to life in life. Then the distribution is expected to overcome the problem of income distribution between various classes in society. Therefore in Islam Allah SWT implies one form of social virtue, like zakat. If this is used as the concept of income distribution, the economic system will run smoothly and the community will prosper.

Gap and hunger will easily be eliminated due to the prevalence of the distribution system. And in Islamic economics a person's wealth does not make the cause of others experiencing economic difficulties, both production and consumption. Therefore Islam provides clear boundaries in living this life, including regulating matters regarding distribution. The whole is to regulate so that there is no social inequality between one party and another party and have an impact on actions or counterproductive. Therefore Islam stipulates the existence of distribution instruments, including the principle of cooperation between mudharabah and musyarakah, the existence of zakat, infaq, alms and endowments as well as other assets or income owned.

Keyword: *Distribution, Islamic Economics, Economic System*

Latar Belakang Masalah

Dalam ilmu ekonomi manusia mengenal tiga konsep utama dalam rangka menunjang pemenuhan kebutuhan, ketiga konsep ekonomi tersebut adalah produksi, konsumsi dan distribusi. Menurut teori ekonomi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan/manfaat suatu barang.¹ Sedangkan untuk kata konsumsi berasal dari bahasa Belanda *consumptie*, ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Untuk distribusi sendiri diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, dalam ibadah maupun muamalah, dalam konteks muamalah termasuk terkait dengan ketentuan produksi, konsumsi dan distribusi. Dalam pembahasan teori ekonomi mikro Islam, distribusi menjadi posisi penting karena pembahasan mengenai hal tersebut tidak hanya berkaitan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Konsep Islam tentang distribusi pendapatan yang dikonsumsi atau yang diproduksi umat Islam tidak mengandung riba, tidak mengandung kegiatan yang haram dan harta bagi konsumen dan produsen dikenai zakat.²

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, UIN-Malang Press, 2008, hlm 157

² Nofrianto, Dosen IAIN STS Jambi, Makalah: *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Syariah

Distribusi dalam konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi dimana ukuran berdasarkan atas jumlah harta pemilikan *an sich*, tetapi juga membahas bagaimana bisa terdistribusi penggunaan potensi kemanusiannya, yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Maka distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat.³ Karenanya dalam Islam Allah SWT mensyariatkan salah satu bentuk kebajikan sosial, seperti halnya zakat. Jika hal ini dijadikan konsep distribusi pendapatan, maka sistem perekonomian akan berjalan lancar dan masyarakat akan sejahtera.

PEMBAHASAN

Moral dalam Sistem Distribusi Pendapatan Islam

Dalam ekonomi kapitalisme setiap individu diwajibkan memiliki kebebasan sepenuhnya, tujuannya agar setiap orang dapat memproduksi kekayaan dalam kuantitas yang sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kemampuan yang ia miliki. Kapitalisme juga mengakui tak terbatasnya hak individu dalam kepemilikan pribadi pada satu sisi dan menghalalkan pendistribusian yang tidak adil pada sisi yang lain.

Konsep sebaliknya yang kontradiktif dengan kapitalisme adalah sosialisme. Dimana sosialisme menyetujui penghapusan kebebasan individu dan kepemilikan pribadi secara utuh dan menyeluruh, dengan tujuan pemerataan ekonomi di antara penduduk. Dapat disimpulkan bahwa kapitalisme menghendaki penguasaan produksi kekayaan, dan sosialisme menghapus disparitas distribusi kekayaan tanpa memperhatikan efek domino bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut, selain itu juga terkait model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.⁴

Islam berada pada jalan tengah antara pola kapitalis dan sosialis yaitu tidak memberikan kebebasan mutlak maupun hak yang tidak terbatas dalam pemilikan kekayaan pribadi bagi individu dalam lapangan produksi, dan tidak pula mengikat individu pada sebuah sistem pemerataan ekonomi yang di bawah sistem ini ia tidak dapat memperoleh dan memiliki kekayaan secara bebas. Islam menganggap bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna, paling mulia dan bahkan manusia diberikan kepercayaan sebagai sebagai khalifah yang bertugas untuk mengelola dunia guna mencapai kemakmuran.

Islam mendorong penganutnya untuk memanfaatkan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Maka karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, baik materi maupun nonmateri dengan bekerja melalui berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan yang ada. Maka

³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009, hlm 117

⁴ Wida Robiatul, *Distribusi dalam Ekonomi Islam*, www.distribusiislam.htm, posting 01 Februari 2013

dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah, dalam ekonomi Islam kegiatan manusia tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting terdapat dimensi lain secara substantif yakni untuk maksimalisasi keuntungan akhirat. Urusan kesejahteraan di dunia merupakan sarana yang harus linier untuk memperoleh kesejahteraan akhirat.

Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktifitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yakni nilai kebebasan dan nilai keadilan.

Nilai Kebebasan

Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi kekayaan, persoalan tersebut erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan mentauhidkan-Nya. Tauhid mengandung makna bahwa semua yang ada di dunia dan alam semesta adalah berpusat pada Allah. Maka hanya kepada Allah saja setiap manusia melakukan pengabdian, Dia-lah yang menentukan rezki dan kehidupan manusia tanpa seorangpun bisa mengaturnya.

Sesungguhnya kebebasan yang disyariatkan oleh Islam dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan. Tapi yang dimaksud adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan nilai-nilai "keadilan" yang digariskan Allah SWT.

Nilai Keadilan

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan pondasi yang kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syariah dan akhlak (moral). Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu baik moral ataupun materil. Ia adalah keseimbangan (*tawazun*) antara personal dan komunal. Keadilan yang benar dan ideal adalah yang tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Setiap orang harus diberi kesempatan dan sarana yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam distribusi Islami terdapat 3 poin penting yang harus terpenuhi, yakni: *kesatu*, Terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang *Kedua*, Kesederajatan atas pendapatan setiap personal, tetapi tidak dalam pengertian kesamarataan *Ketiga*, Mengeliminasi ketidaksamarataan yang bersifat ekstrim atas pendapatan dan kekayaan individu.

Sistem Distribusi dalam Islam

Pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

Sistem Distribusi Komersial

Sistem ini bersifat komersil, berlangsung melalui proses ekonomi, menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Euis Amalia, ada empat aspek terkait keadilan dalam distribusi, yakni:

- ✓ *Al-Ujrah al-Mitsl* (Gaji yang setara bagi para pekerja)
- ✓ Profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudharabah* atau bagi hasil (*profit sharing*) untuk modal dana melalui *musyarakah*.
- ✓ Biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya.
- ✓ Tanggungjawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya.

Sistem Distribusi Sosial

Dalam Islam sistem ini diciptakan untuk memastikan keseimbangan pendapatan dalam masyarakat, mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena sebab yatim dan atau piatu, jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka dengan beberapa bentuk varian, diantaranya dengan zakat, infak dan sedekah.

Instrumen Distribusi Pendapatan (Kekayaan) dalam Islam

Mudharabah

Melaui sistem ini pendistribusian harta kekayaan terjadi dalam bentuk kerja sama antara seorang yang mempunyai *surplus unit* dengan mitra kerja yang hanya punya skill sekaligus sebagai pihak yang *deficits unit*. Dengan terjadinya kerja sama antara *shahibul mal* dengan mitranya dengan sendirinya menjalankan pola distribusi yang adil dan berdasarkan hubungan kemitraan.

Musyarakah

Syirkah atau perseroan adalah suatu bentuk transaksi antara dua orang atau lebih, yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Musyarakah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha atau modal dalam bentuk *cooperate* dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan. Musyarakah berbeda dari mudharabah, dalam mudharabah pemilik modal tidak diberikan peran dalam menjalankan manajemen perusahaan, sedangkan dalam musyarakah semua pihak berhak turut serta dalam pengambilan keputusan manajerial.

Distribusi Pendapatan melalui Pola Mekanisme Pasar

Allah SWT telah memberikan hak tiap orang untuk membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa'id: Nabi saw bersabda: "*Sesungguhnya jual beli itu (sah karena) sama-sama suka*" Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran terjadi secara seimbang dengan rela sama rela (*an taradhin*) atau tidak ada pemaksaan terhadap harga tersebut pada saat transaksi. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan secara adil.

Orang-orang yang menyembunyikan (menimbun) hartanya yang dikumpulkan sesungguhnya mereka telah menghambat arus industri, serta menghalangi kemajuan dan pembangunan negara.

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. (QS. Al-Humazah 104:1-3)

Distribusi Pendapatan melalui Sistem Zakat

Menurut Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Langkah ini merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang muslim yang kaya dan diserahkan kepada orang miskin. Tujuan utama zakat adalah membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang miskin dan melarat sehingga tidak ada seorangpun yang menderita dalam suatu negara.

Harta zakat dianggap sebagai salah satu jenis harta yang diletakkan di dalam *baitul mal*, yang berbeda dari jenis harta lain (pajak umum), baik dari segi pemerolehannya (tidak akan dikumpulkan kecuali dari orang-orang muslim), dari segi batas waktu/kadar dikumpulkan (*nishab*), maupun dari segi pembelanjanya (*asnab*).

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan dianggap sebagai salah satu rukun Islam. Adapun obyek-obyek zakat dan pembelanjanya, semuanya telah ditentukan dengan batasan yang jelas, sehingga zakat tersebut tidak akan diserahkan kepada selain delapan *ashnaf*, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah: 60.

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”

Menurut M.A Mannan dalam bukunya *Islamic Economic: Theory and Practice*, zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikannya, maka dia merasakan belum sempurna ibadahnya
2. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan (*justice*), yaitu pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada umat-Nya.
3. Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan, artinya produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil produksi tersebut hanya dapat diambil setelah melewati batas waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

4. Prinsip nalar (*reason*), nalar dan kelima kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa bertanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama
5. Prinsip kebebasan (*freedom*)
6. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.

Distribusi Pendapatan Melalui Infak, Sedekah dan Wakaf

Menurut Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Untuk khalayak umum Islam memperkenalkan instrumen distribusi lain, yakni wakaf. Dimana bentuk dan caranya kuantitasnya banyak sekali, dari gedung, uang tunai (wakaf tunai), tanah, bahan bangunan, kendaraan serta aset-aset produktif lainnya.

Dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa yang dimaksud Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

Distribusi Pendapatan Melalui Sistem Pewarisan dan Wasiat

Islam ingin memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh berpusat pada seorang saja, betapapun kayanya seseorang, jika si bapak meninggal dunia maka anak, istri, ibu, bapak, kakek, dan kerabat lainnya akan kebagian peninggalannya.

Hukum waris dan wasiat merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan pembagian warisan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh ekonomi, seperti Keynes, Taussig dan Irvings Fisher menyetujui bahwa pembagian warisan yang tidak merata merupakan penyebab utama dari ketidakadilan dalam masyarakat Menurut Taussig, warisan mempunyai dampak-dampak yang sangat besar dalam masyarakat. Hal tersebut senantiasa memperbesar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Hukum waris bagi muslim merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif dalam rangka mencegah pengumpulan kekayaan di kalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok yang besar dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum waris mempunyai pengaruh yang cukup baik dalam pengembangan sirkulasi harta di kalangan masyarakat. Hukum waris merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan pembagian warisan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh ekonomi, seperti Keynes, Taussig dan Irvings Fisher menyetujui bahwa pembagian warisan yang tidak merata merupakan

penyebab utama dari ketidakadilan dalam masyarakat. Menurut Taussig, warisan mempunyai dampak-dampak yang sangat besar dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu untuk hidup dengan sendiri, satu makhluk dengan yang lainnya memiliki keterikatan kebutuhan. Begitulah Islam mengajarkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan. Melalui distribusilah kita mampu menghasilkan sesuatu yang kita butuhkan, seperti keperluan rumah tangga, maupun jasa.

Kesenjangan dan kelaparan akan mudah dihapuskan karena meratanya sistem distribusi. Dan dalam ekonomi Islam kekayaan seseorang yang dimiliki tidak menjadikan sebab orang lain mengalami kesulitan ekonomi, baik produksi maupun konsumsi. Karenanya Islam memberikan batas-batas yang jelas dalam menjalani kehidupan ini, termasuk mengatur hal mengenai distribusi. Keseluruhannya untuk mengatur agar tidak terjadi ketimpangan sosial antara satu pihak dengan pihak lain dan berdampak pada tindakan atau yang kontra produktif.

Oleh karena itu Islam menetapkan adanya instrumen distribusi, diantaranya adalah prinsip kerjasama mudharabah maupun musyarakah, adanya zakat, infak, sedekah dan wakaf serta lainnya kekayaan atau pendapatan yang dimiliki.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam - Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2010
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2010
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, November 2013
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI) 2008
- Wida Robiatul, *Distribusi dalam Ekonomi Islam*, www.distribusiislam.htm, posting, 01 Februari 2013
- Nofrianto, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*, IAIN STS Jambi, Syariah HUT